STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	**Nomor SOP**	B-605/SET.DPMD/000.8.3.3/09/2026
	Tanggal Pembuatan	16 September 2026
	Tanggal Revisi	-
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ARIANTO, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda (IV/c)
	Nama SOP	**Penggunaan Aplikasi SIPD Penatausahaan**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 6. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 9. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah	a. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Proses pembayaran Keuangan b. Memiliki kemampuan dalam proses pembayaran Keuangan c. Memiliki kemampuan dalam memverifikasi dokumen pembayaran d. Memiliki kemampuan mengoperasikan Program aplikasi
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Laporan Fungsional 2. SOP Otorisasi Keuangan 3. SOP Transaksi Keuangan	1. Komputer/Lap Top dan Peralatan Penukung Lainnya 2. Dokumen berupa Laporan pengesahan SPJ, SPP, SPM, SP2D dan Dokumen menyangkut pertanggung jawaban keuangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika proses Penggunaan Aplikasi SIPD Penatausahaan tidak dilaksanakan sesuai SOP maka akan mengganggu kelancaran proses transaksi keuangan perangkat daerah	1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual Dokumen 2. Dokumen Pembayaran Keuangan Perangkat Daerah terdapat pada Arsip yang diperoleh dari Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPTK	BP/BPP	Pejabat Penatausahaan Keuangan	PA/KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengaturan Akses & Penugasan (Oleh Admin/PA) Akses Aplikasi					Perangkat komputer dan jaringan internet	30 Menit	Akun Admin SIPD Penatausahaan	
2.	Akses Aplikasi					Perangkat komputer dan jaringan internet	15 Menit	Akun Bendahara pengeluaran	
3.	Login Pengguna					Perangkat komputer dan jaringan internet	15 menit	Akun PPTK	
4.	Perekaman Dokumen Pelaksanaan					Perangkat komputer dan jaringan internet	15 Menit	Akun Pejabat Penatausahaan Keuangan	
5.	Pengajuan SPP (Surat Penyediaan/Permintaan Pembayaran)					Perangkat komputer dan jaringan internet	2 Jam	Akun PPTK	
6.	Persetujuan oleh Pengguna Anggaran					Perangkat komputer dan jaringan internet	30 menit	Akun PA	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).